



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian tugas jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Leading Sector yang mengemban tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis badan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari

1. Sekretariat;
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan
2. Bidang Anggaran;
  - 1) Sub Bidang Anggaran



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

- 2) Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya
- 3) Sub Bidang Belanja Bantuan Sosial Hibah dan Pembiayaan
3. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
  - 1) Sub Bidang Perbendaharaan
  - 2) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  - 3) Sub Bidang Persediaan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah
4. Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
  - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang Aset Daerah
  - 2) Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan
  - 3) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru mempunyai peran yang amat strategis dalam menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang keuangan dan aset di lingkup Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan predikat tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2019 dan 2020 diharapkan tetap akan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan yaitu untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini disajikan dengan Basis Akrual sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- l. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru;
- m. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 bab yaitu :

- BAB I    Pendahuluan
  - 1.1    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2    Landasan Hukum Penyusunan Laporan KeuanganSistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
  
- BAB II   Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
  - 2.1    Kebijakan Umum Anggaran
  - 2.2    Kebijakan KeuanganPencapaian Target Kinerja APBD
  
- BAB III  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja KeuanganHambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

- BAB IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
  - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
    - 5.1.1 Belanja
    - 5.1.2 Surplus/Defisit-LRA
    - 5.1.3 Pembiayaan
    - 5.1.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
  - 5.2 NERACA
    - 5.2.1 Aset Lancar
    - 5.2.2 Investasi Jangka Panjang
    - 5.2.3 Aset Tetap
    - 5.2.4 Aset Lainnya
    - 5.2.5 Kewajiban
  - 5.3 LAPORAN OPERASIONAL
    - 5.3.1 Pendapatan-LO
    - 5.3.2 Beban
    - 5.3.3 Surplus/Defisit-LO
  - 5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
    - 5.4.1 Ekuitas Awal
    - 5.4.2 Surplus/Defisit-LO
    - 5.4.3 Koreksi-Koreksi
    - 5.4.4 Ekuitas Akhir
- BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
- BAB VII Penutup



## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Kebijakan Umum Anggaran**

Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur APBD pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD pada sisi Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Klasifikasi belanja tersebut diatas diklasifikasikan kembali menurut organisasi. Sesuai dengan SOTK Pemerintah Kota Banjarbaru maka terjadi penggabungan beberapa urusan, ke dalam satu organisasi. Di samping itu belanja juga diklasifikasikan menurut program dan Kegiatan, menurut kelompok belanja terdiri dari belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu Belanja Pegawai saja.

Adapun belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

#### **2.2 Pencapaian Target Kinerja**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru selama tahun 2020 telah melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pencapaian terhadap sasaran – sasaran Tahun 2020 pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja ( PK ) dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persen
1	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru	Persentase Rancangan Perda APBD dan APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	Persen	95	95	95
4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BMD Kota Banjarbaru	Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru	Persen	100	100	100

Capaian atas indikator kinerja ini telah didukung melalui program :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun suatu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Belanja Daerah Kota Banjarbaru disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil) hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi anggaran dimaksud. Oleh karena itu orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru dari sisi belanja menganggarkan sebesar Rp.28.914.834.967,00 dan terealisasi sebesar Rp.25.657.114.904,00 atau sebesar 89% yang terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Operasi (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) sebesar Rp.24.002.264.967,00 dengan realisasi sebesar Rp.21.000.497.144,00
2. Anggaran belanja Modal sebesar Rp.4.912.570.000,00 dengan relisasi sebesar Rp.4.656.617.760,00

*Tabel Rincian Belanja BPKAD:*

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>24.002.264.967,00</b>	<b>21.743.122.522,00</b>	<b>87%</b>
	Belanja Pegawai	17.070.458.130,00	15.703.22.565,00	91%
	Belanja Barang dan Jasa	6.931.806.837,00	6.039.899.957,00	78%
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>4.912.570.000,00</b>	<b>4.662.327.760,00</b>	<b>95%</b>
	Belanja Modal Tanah	397.240.000,00	310.629.760,00	78%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.428.030.000,00	3.279.800.000,00	96%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.064.100.000,00	1.053.898.000,00	99%
	Belanja Modal Aset Lain-lain	23.200.000,00	18.000.000,00	78%
	<b>Total</b>	<b>28.914.834.967,00</b>	<b>25.657.114.904,00</b>	<b>89%</b>

**3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan**

Pada tahun 2020 ini pelaksanaan pencapaian target kinerja sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru. dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

#### **4.1 Entitas Akuntansi**

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

##### **a. Entitas Akuntansi**

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014, Basis Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan didalam lingkup Pemerintah Daerah Banjarbaru sejak tahun 2015 adalah Basis Akrual. Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.

##### **b. Entitas Pelaporan**

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

#### **4.2 Entitas Pelaporan**

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

##### **4.3.1 Pengukuran Pendapatan**

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :

##### **1) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

##### **2) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

#### **4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja**

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

##### **1) Beban**

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

##### **2) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.3.3 Pengukuran Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

#### **4.3.4 Pengukuran Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### **4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas**

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud.

#### **4.3.6 Pengukuran Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayaratas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.

Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
  - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
  - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
  - b) Penghapusan bukuan (*write down*)  
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).  
Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
  - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
  - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- c) Penghapustagihan (*write off*)
- Penghapus tagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi. Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:
- (1) Penghapustagihan karena mengingot jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
  - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
  - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
  - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
  - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan
- Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut



dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

#### 4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan  
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### **4.3.8 Pengukuran Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

- a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

- b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

#### **4.3.9 Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

#### **4.3.10 Penyusutan Aset Tetap**

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+1.

#### **4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

#### **4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
  - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
  - b. Tagihan Tuntunan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
  - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
  - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
  - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

- d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeuarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (*ATB*)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.
4. Aset Lain lain

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

#### **4.3.13 Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
  - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

- b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

#### **4.3.14 Pengukuran Ekuitas**

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Deposito LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Deposito –LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

#### **4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang.

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

## 2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/ normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

### 4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur belanja.

5.1.1 Belanja

<b>31 Desember 2020</b> (Rp)	<b>31 Desember 2019</b> (Rp)
<b>28.914.834.967,00</b>	<b>22.737.686.739,00</b>

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Belanja Operasi	24.002.264.967,00	21.743.122.522,00	91%	17.794.889.750,00
2	Belanja Modal	4.912.570.000,00	4.662.327.760,00	95%	1.924.280.020,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.914.834.967,00</b>	<b>26.405.450.282,00</b>	<b>91%</b>	<b>18.865.541.660,00</b>

5.1.1.1 Belanja Operasi

<b>31 Desember 2020</b> (Rp)	<b>31 Desember 2019</b> (Rp)
<b>24.002.264.967,00</b>	<b>20.637.296.739,00</b>

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	17.070.458.130,00	15.703.222.565,00	92%
2	Belanja Barang dan Jasa	6.931.806.837,00	6.039.899.957,00	87%
<b>TOTAL</b>		<b>24.002.264.967,00</b>	<b>21.743.122.522,00</b>	<b>91%</b>

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

<b>ANGGARAN TA 2020</b> (Rp)	<b>REALISASI TA 2020</b> (Rp)
<b>17.070.458.130,00</b>	<b>15.703.222.565,00</b>

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.749.534.130,00	14.493.056.965,00	92%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.320.924.000,00	1.210.165.600,00	92%
<b>TOTAL</b>		<b>17.070.458.130,00</b>	<b>15.703.222.565,00</b>	<b>92%</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

**5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

<b>ANGGARAN TA 2020</b>	<b>REALISASI TA 2020</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>6.931.806.837,00</b>	<b>6.039.899.957,00</b>

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	681.092.914,00	582.926.347,00	86%
2	Belanja Jasa Kantor	2.342.097.500,00	2.056.237.473,00	88%
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.420.500,00	20.303.435,00	31%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.690.250,00	461.598.850,00	84%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	9.800.000,00	39%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	0,00	0%
7	Belanja Makanan dan Minuman	328.559.000,00	234.266.000,00	74%
8	Belanja Perjalanan Dinas	337.247.673,00	299.256.367,00	89%
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	-
10	Belanja Pemeliharaan	403.359.000,00	285.135.000,00	71%
11	Belanja Honorarium PNS Dan Non PNS	1.904.150.000,00	1.826.700.000,00	96%
12	Belanja Honorarium Non PNS	289.440.000,00	263.676.485,00	91%
<b>TOTAL</b>		<b>6.931.806.837,00</b>	<b>6.039.899.957,00</b>	<b>87%</b>

**5.1.1.2 Belanja Modal**

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4.912.570.000,00</b>	<b>2.100.390.000,00</b>

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Tanah	397.240.000,00	310.629.760,00	78%
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.428.030.000,00	3.279.800.000,00	96%
3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.064.100.000,00	1.053.898.000,00	99%
4	Belanja Aset Lain-lain	23.200.000,00	18.000.000,00	78%
<b>TOTAL</b>		<b>4.912.570.000,00</b>	<b>4.662.327.760,00</b>	<b>95%</b>

**5.1.1.2.1 Belanja Tanah**

<b>ANGGARAN TA 2020</b>	<b>REALISASI TA 2020</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>397.240.000,00</b>	<b>310.629.760,00</b>

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah**

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Tanah Perkampungan	397.240.000,00	310.629.760,00	78%
<b>TOTAL</b>		<b>397.240.000,00</b>	<b>310.629.760,00</b>	<b>78%</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

**5.1.1.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin**

<b>ANGGARAN TA 2020</b>	<b>REALISASI TA 2020</b>
(Rp)	(Rp)
<b>3.428.030.000,00</b>	<b>3.279.800.000,00</b>

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.051.450.000,00	2.907.180.000,00	95%
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	8.250.000,00	8.040.000,00	97%
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	145.030.000,00	144.030.000,00	99%
4	Belanja Modal Pengadaan Komputer	177.760.000,00	175.770.000,00	99%
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	45.540.000,00	44.780.000,00	98%
<b>TOTAL</b>		<b>3.428.030.000,00</b>	<b>3.279.800.000,00</b>	<b>96%</b>

**5.1.1.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan**

<b>ANGGARAN TA 2020</b>	<b>REALISASI TA 2020</b>
(Rp)	(Rp)
<b>1.064.100.000,00</b>	<b>1.053.898.000,00</b>

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.064.100.000,00	1.053.898.000,00	99%
<b>TOTAL</b>		<b>1.064.100.000,00</b>	<b>1.053.898.000,00</b>	<b>99%</b>

**5.1.1.2.4 Belanja Aset Lain-lain**

<b>ANGGARAN TA 2020</b>	<b>REALISASI TA 2020</b>
(Rp)	(Rp)
<b>23.200.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lain - lain**

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	18.200.000,00	13.200.000,00	75%
2	Belanja Modal Pengadaan Aset Lain-Lain	5.000.000,00	4.800.000,00	95%
<b>TOTAL</b>		<b>23.200.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>85%</b>

**5.1.2 Surplus/Defisit LRA**

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
(Rp)	(Rp)
<b>(28.914.834.967,00)</b>	<b>(22.737.686.739,00)</b>



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel Surplus/Defisit LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Pendapatan	0	0		0
2	Belanja	28.914.834.967,00	26.405.450.282,00	91%	19.719.169.770,00
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(28.914.834.967,00)</b>	<b>(26.405.450.282,00)</b>	<b>91%</b>	<b>(19.719.169.770,00)</b>

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>28.914.834.967,00</u>	<u>19.719.169.770,00</u>

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0%	0,00
2	Belanja	0,00	0,00	0%	0,00
3	Surplus (Defisit)	-28.914.834.967,00	-26.405.450.282,00	91%	-19.719.169.770,00
4	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0%	0,00
	<b>SILPA</b>	<b>-28.914.834.967,00</b>	<b>-26.405.450.282,00</b>	<b>91%</b>	<b>-19.719.169.770,00</b>

5.2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan di Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.627.401.582,91 dan Rp2.262.830.863,43. Saldo Aset per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp364.570.719,48 atau sebesar **0,16%** dari Saldo Aset per 31 Desember 2019. Penjelasan dari unsur-unsur Aset sebagai berikut:

5.2.1 Aset Lancar

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>29.228.500,00</u>	<u>11.770.500,00</u>

5.2.1.1 Persediaan

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>29.228.500,00</u>	<u>11.770.500,00</u>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Uraian	TA 2020	TA 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Alat Tulis kantor	5.450.500	2.774.500,00
2	Perlengkapan Peralatan Komputer	20.310.000	7.760.000,00
3	Cetak	1.500.000	1.236.000,00
4	Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1.968.000	-
<b>TOTAL</b>		<b>29.228.500,00</b>	<b>11.770.500,00</b>

### 5.2.2 Aset Tetap

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b><u>7.695.913.201,05</u></b>	<b><u>6.502.786.437,06</u></b>

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebelum akumulasi penyusutan masing-masing sebesar **Rp7.695.913.201,05** dan **Rp6.517.286.437,06** yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan komposisi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan Mesin	5.082.591.201,05	4.943.362.437,06	139.228.763,99
Gedung bangunan	2.560.747.000,00	1.506.849.000,00	1.053.898.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Aset Tetap</b>	<b>7.695.913.201,05</b>	<b>6.502.786.437,06</b>	<b>1.193.126.763,99</b>

Sesuai perbandingan saldo aset tetap, pada tahun 2020 terjadi mutasi tambah dan kurang terhadap saldo aset tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	TANAH (Rp)	PERALATAN DAN MESIN (Rp)	GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (Rp)	ASET TETAP LAINNYA (Rp)	KDP (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2019	-	4.943.362.437,06	1.506.849.000,00	49.350.000,00	3.225.000,00	-
2	Koreksi Kurang	-	-	-	-	-	-
3	Koreksi Tambah	-	-	-	-	-	-
4	<b>Saldo Awal 2020 (1-2+3)</b>	<b>-</b>	<b>4.943.362.437,06</b>	<b>1.506.849.000,00</b>	<b>49.350.000,00</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>-</b>
<b>PENAMBAHAN</b>							
5	Belanja Modal 2020	310.629.760,00	3.279.800.000,00	1.053.898.000,00	-	-	-
6	Retensi 5%	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Pegawai 2020	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Barang Jasa 2020	-	26.010.000,00	9.000.000,00	-	-	-
9	BOP/BOS/BOM	-	-	-	-	-	-
10	Hibah	-	-	-	-	-	-
11	Penambahan KDP	-	-	-	-	-	-
12	Mutasi Antar SKPD	-	-	-	-	-	-
13	Reklasifikasi KIB	-	-	-	-	-	-
14	<b>Jumlah Penambahan (5 s.d 13)</b>	<b>310.629.760,00</b>	<b>3.305.810.000,00</b>	<b>1.062.898.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PENGURANGAN</b>							
15	Pengurangan KDP	-	-	-	-	-	-
16	Retensi 5%	-	-	-	-	-	-
17	Non Aset	-	-	-	-	-	-
18	Ekstra	-	11.565.978,09	9.000.000,00	-	-	-
19	Penghapusan	-	-	-	-	-	-
20	Pengembalian Dana	-	-	-	-	-	-



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

No	URAIAN	TANAH (Rp)	PERALATAN DAN MESIN (Rp)	GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (Rp)	ASET TETAP LAINNYA (Rp)	KDP (Rp)
21	Mutasi Antar SKPD	310.629.760,00	3.038.157.257,92				
22	Reklasifikasi KIB		116.858.000,00				
23	Jumlah Pengurangan (15 s.d 22)	310.629.760,00	3.166.581.236,01	9.000.000,00	-	-	-
	Saldo Per 31 Desember 2020 (4+14-23)	-	5.082.591.201,05	2.560.747.000,00	49.350.000,00	3.225.000,00	-

Penjelasan atas saldo dan mutasi masing-masing komponen aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

#### 5.2.2.1 Tanah

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Banjarbaru dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Saldo Tanah per 31 Desember Tahun 2019 tersebut berkurang sebesar Rp0 atau 0% karena adanya pengurangan sebagai berikut:

No.	URAIAN	TANAH (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2019	0,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	<b>Saldo Awal 2020 (1-2+3)</b>	<b>0,00</b>
	<b>PENAMBAHAN</b>	
5	Belanja Modal 2020	310.629.760,00
6	Retensi 5%	-
7	Belanja Pegawai 2020	-
8	Belanja Barang Jasa 2020	-
9	BOP/BOS/BOM	-
10	Hibah	-
11	Penambahan KDP	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	-
14	<b>Jumlah Penambahan (5 s.d 13)</b>	<b>310.629.760,00</b>
	<b>PENGURANGAN</b>	
15	Pengurangan KDP	-
16	Retensi 5%	-
17	Non Aset	-
18	Ekstra	-
19	Penghapusan	-
20	Pengembalian Dana	-
21	Mutasi Antar SKPD	310.629.760,00
22	Reklasifikasi KIB	-
23	<b>Jumlah Pengurangan (15 s.d 22)</b>	<b>310.629.760,00</b>
	<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (4+14-23)</b>	<b>0,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

**A. Penambahan Aset Tetap-Tanah Tahun 2020 sebesar Rp310.629.760,00**

Penambahan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Modal sebesar Rp310.629.760,00 terdiri dari:
  - a. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat sebesar Rp3.789.360,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Tanah Milik Pemko Banjarbaru Fasilitas Umum.
  - b. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat sebesar Rp660.200,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Tanah Milik Pemko Banjarbaru Fasilitas Umum Lapangan Tenis Jalan Taman Gembira Timur.
  - c. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat sebesar Rp4.445.400,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Tanah Milik Pemko Banjarbaru Kantor Lurah Guntung Paikat Jalan Taman Gembira Selatan.
  - d. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat sebesar Rp283.400,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Tanah Milik Pemko Banjarbaru Fasilitas Umum Puja Sera Jalan Taman Gembira Selatan.
  - e. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat sebesar Rp1.287.200,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru Rencana Rumah Dinas Jabatan Jalan Taman Gembira Selatan.
  - f. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat sebesar Rp469.400,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru PKK Kota Banjarbaru Jalan Taman Gembira Barat.
  - g. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat sebesar Rp330.000,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru Gerai Pelayanan Eks Kantor Camat Landasan Ulin Jalan A.Yani KM.24.500.
  - h. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp606.000,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru Kantor Camat Banjarbaru Selatan Jl. RO Ulin.
  - i. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp920.200,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Jl.Pangeran Antasari No.4.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

- j. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp1.859.600,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru Kolam Renang Idaman Banjarbaru Jl.Taman Gembira Utara.
- k. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp1.362.000,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru Polsek Kota Banjarbaru.
- l. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp1.602.000,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru Disdukcapil & Dishub.
- m. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp1.159.680,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru SDN 2 Kemuning.
- n. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp3.148.560,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru Lapangan Bola SPMA.
- o. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp1.218.000,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru Disdalduk & Arsip.
- p. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp1.852.080,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru SMA PGRI 1 BJB.
- q. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp865.440,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru Kantor Lurah Kemuning.
- r. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp741.360,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Hak Pakai Milik Pemko Banjarbaru TK Harapan.
- s. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp1.602.480,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Pemko Banjarbaru STIKIP PGRI.
- t. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp786.000,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Pemko Banjarbaru BAPPEDA.
- u. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp882.000,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Pemko Banjarbaru Kantor Lurah Komet.
- v. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp1.528.560,00, diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Tanah milik Pemko Banjarbaru .
- w. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp1.041.840,00 diperuntukan untuk Pembuatan Sertifikat Tanah milik Pemko Banjarbaru .



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

- x. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp216.440.000,00, diperuntukan untuk Pondasi batas tanah milik Pemko Banjarbaru wilayah Kel.Gt.Manggis.
- y. Pengadaan Tanah Kampung Sertifikat Sebesar Rp65.745.000,00, diperuntukan untuk Pondasi batas tanah milik Pemko Banjarbaru wilayah Syamsudin Noor.

**B. Pengurangan terhadap Aset Tetap-Tanah tahun 2020 sebesar Rp310.629.760,00**

Pengurangan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Jumlah Pengurangan sebesar Rp310.629.760,00 terdiri dari:
  - a. Mutasi kurang tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebesar Rp310.629.760,00 diberikan kepada Pengelola.

Berdasarkan keseluruhan data di atas diketahui bahwa total saldo Aset tetap-tanah di neraca per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0. Adapun jumlah tanah yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2019 adalah sebesar 0.

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar 0 yang akan menjadi saldo awal neraca aset tetap-tanah per 1 Januari 2020.

**5.2.2.2 Peralatan dan Mesin**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b><u>5.082.591.201,05</u></b>	<b><u>4.943.362.437,06</u></b>

Aset tetap peralatan dan mesin mencakup alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat laboratorium dan alat-alat persenjataan/keamanan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai di atas batas kapitalisasi yang sudah diatur dalam kebijakan akuntansi. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar **Rp5.082.591.201,05** dan **Rp4.943.362.437,06** Terjadi penambahan aset tetap-peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar **Rp139.228.763,99** atau 0,11% dari total peralatan dan mesin tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN (RP)
1	Saldo Per 31 Desember 2019	<b>4.943.362.437,06</b>
2	Koreksi Kurang	0



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN (RP)
3	Koreksi Tambah	0
4	<b>Saldo Awal 2020 (1-2+3)</b>	<b>4.943.362.437,06</b>
	<b>PENAMBAHAN</b>	
5	Belanja Modal 2020	3.279.800.000,00
6	Retensi 5%	-
7	Belanja Pegawai 2020	-
8	Belanja Barang Jasa 2020	26.010.000,00
9	BOP/BOS/BOM	-
10	Hibah	-
11	Penambahan KDP	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	-
14	<b>Jumlah Penambahan (5 s.d 13)</b>	<b>3.305.810.000,00</b>
	<b>PENGURANGAN</b>	
15	Pengurangan KDP	-
16	Retensi 5%	-
17	Non Aset	-
18	Ekstra	11.565.978,09
19	Penghapusan	-
20	Pengembalian Dana	-
21	Mutasi Antar SKPD	3.038.157.257,92
22	Reklasifikasi KIB	116.858.000,00
23	<b>Jumlah Pengurangan (15 s.d 22)</b>	<b>3.166.581.236,01</b>
	<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (4+14-23)</b>	<b>5.082.591.201,05</b>

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

- A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp3.166.581.236,01
- B. Koreksi Tambah Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp3.305.810.000,00
- C. Penambahan Aset Tahun 2020 sebesar Rp3.305.810.000,00

Penambahan Aset Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan belanja modal Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2020 yang merupakan realisasi belanja modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dengan nilai sebesar Rp3.305.810.000,00 dengan perincian pada tabel sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah
1	Alat Penghancur Kertas	3	2.680.000,00	8.040.000,00
2	Meja Besi/Metal	1	454.558,09	454.558,09
3	Kursi Besi/Metal	1	2.474.816,29	2.474.816,29
4	Meja Rapat	1	10.000.278,05	10.000.278,05
5	Kursi Rapat	20	555.571,00	11.111.420,00
6	Kursi Kerja	7	1.010.129,10	7.070.903,70



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah
8	Mesin Cuci	2	3.350.000,00	6.700.000,00
9	Lemari Es	2	4.000.000,00	8.000.000,00
10	AC Split	1	9.521.087,23	9.521.087,23
11	AC Split	3	8.986.194,69	26.958.584,07
12	AC Split	1	5.830.328,70	5.830.328,70
13	Televisi	1	6.460.000,00	6.460.000,00
14	Televisi	2	4.000.000,00	8.000.000,00
15	P.C Unit/ Komputer PC	2	8.559.101,27	17.118.202,54
16	Lap Top	3	12.560.101,27	37.680.303,81
17	Lap Top	2	24.900.000,00	49.800.000,00
18	Lap Top	1	12.160.000,00	12.160.000,00
19	Printer	3	5.870.000,00	17.610.000,00
20	Printer	1	7.730.000,00	7.730.000,00
21	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	8.081.032,77	8.081.032,77
22	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	7.020.397,22	21.061.191,66
23	Meja Kerja	7	5.252.671,30	36.768.699,10
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	1.565.700,10	4.697.100,30
25	Personal Komputer	2	12.610.746,84	25.221.493,68
26	Personal Komputer	1	8.450.000,00	8.450.000,00
27	CCTV	1	15.620.000,00	15.620.000,00
28	Karpas	1	26.010.000,00	26.010.000,00
29	Sepeda Motor	130	19.300.000,00	2.512.612.683,00
30	Sepeda Motor	20	19.700.000,00	394.567.317,00
<b>Jumlah</b>				<b>3.305.810.000,00</b>

2. Mutasi antar SKPD

Mutasi tambah aset tetap-peralatan dan mesin memiliki penambahan sejumlah Rp3.038.157.257,92

**D. Pengurangan terhadap Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp3.166.581.236,01**

1. Barang Bukan Aset (Ekstrakompatabel) sebesar Rp11.565.978,09

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi. Batas Aset Tetap hanya berlaku untuk perolehan/pengadaan aset Nilainya di atas batas kapitalisasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Bidang Penatausahaan Aset Daerah diketahui terdapat nilai belanja modal dari APBD di bawah batas kapitalisasi sehingga tidak di perhitungkan dalam laporan neraca. Rincian Barang Bukan Aset yang memiliki Ekstrakompatabel dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

No	Kode Barang	URAIAN	Nilai (Rp)
1	02.06.02.01.03	Meja Besi/Metal	454.558,09
2	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
3	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
4	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
5	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
6	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Kode Barang	URAIAN	Nilai (Rp)
7	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
8	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
9	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
10	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
11	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
12	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
13	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
14	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
15	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
16	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
17	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
18	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
19	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
20	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
21	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	555.571,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.565.978,09</b>

2. Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap berdasarkan usulan penghapusan dan telah mendapat persetujuan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Aset Tetap Peralatan Mesin adalah sebesar Rp10.139.500,00 dengan perincian pada tabel sebagai berikut :

No	Kode Barang	URAIAN	Nilai (Rp)
1	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	1.700.000,00
2	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	600.000,00
3	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	600.000,00
4	02.06.02.01.37	Meja Komputer	476.000,00
5	02.06.02.01.37	Meja Komputer	428.000,00
6	02.06.02.01.30	Kursi Putar	440.000,00
7	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	1.230.000,00
8	02.06.02.01.37	Meja Komputer	285.500,00
9	02.06.02.01.37	Meja Komputer	880.000,00
10	02.06.02.01.37	Meja Komputer	2.250.000,00
11	02.04.03.01.32	Multi meter	500.000,00
12	02.06.02.01.39	Bantal	750.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.139.500,00</b>

3. Mutasi antar SKPD dengan nilai sebesar **Rp3.038.157.257,92** dengan perincian sebagai berikut:

- Mutasi berupa 1 unit Mobil Toyota Kijang kepada Pengelola sebesar Rp54.120.000,00;
- Mutasi berupa 1 unit Mobil Toyota Inova kepada Pengelola sebesar Rp100.000.000,00;
- Mutasi berupa 1 unit Mobil Toyota All New Hilux kepada Pengelola sebesar Rp194.855.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

- d. Mutasi berupa 1 unit Sepeda Motor Suzuki Shogun kepada Pengelola sebesar Rp14.194.000,20;
  - e. Mutasi berupa 1 unit Sepeda Motor Honda Supra kepada Pengelola sebesar Rp17.075.366,00;
  - f. Mutasi berupa 1 unit Sepeda Motor Suzuki Smash SR kepada Pengelola sebesar Rp6.500.000,00;
  - g. Mutasi berupa 1 unit Sepeda Motor Honda Supra X125 kepada Pengelola sebesar Rp14.821.000,75;
  - h. Mutasi berupa 20 unit Sepeda Motor kepada Pengelola sebesar Rp394.567.317,00;
  - i. Mutasi berupa 116 unit Sepeda Motor antar SKPD sebesar Rp2.242.023.624,92;
4. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp116.858.000,00 dengan perincian pada tabel sebagai berikut :

No	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Lap Top	20.000.000,00
2.	Unit Pemancar UHF Stationary	4.950.000,00
3.	Unit Pemancar UHF Stationary	4.950.000,00
4.	Dst....	2.750.000,00
5.	Lap Top	12.475.000,00
6.	Lap Top	12.475.000,00
7.	P.C Unit	8.590.000,00
8.	P.C Unit	8.100.000,00
9.	P.C Unit	8.100.000,00
10.	Tustel	4.800.000,00
11.	Sound System	4.000.000,00
12.	Televisi	3.500.000,00
13.	Televisi	3.000.000,00
14.	Dst....	10.000.000,00
15.	Lemari Kaca	1.300.000,00
16.	Lemari Kaca	1.300.000,00
17.	Brandkas	6.568.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>116.858.000,00</b>

Berdasarkan keseluruhan data di atas, total saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp **5.082.591.201,05** yang akan menjadi saldo awal neraca aset tetap-peralatan dan mesin per 1 Januari 2020.

### 5.2.2.3 Gedung dan Bangunan

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2.560.747.000,00</b>	<b>1.506.849.000,00</b>



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Aset tetap-gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, monumen/bangunan bersejarah, bangunan gedung tempat pendidikan, bangunan gedung olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap-gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.560.747.000,00 dan Rp1.506.849.000,00 terjadi penambahan aset tetap-gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.053.898.000,00 atau sebesar 0% dari total aset tetap-gedung dan bangunan tahun 2020, dengan perincian pada table sebagai berikut:

No.	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2019	1.506.849.000,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	<b>Saldo Awal 2020 (1-2+3)</b>	<b>1.506.849.000,00</b>
	<b>PENAMBAHAN</b>	-
5	Belanja Modal 2020	1.053.898.000,00
6	Retensi 5%	-
7	Belanja Pegawai 2020	-
8	Belanja Barang Jasa 2020	9.000.000,00
9	BOP/BOS/BOM	-
10	Hibah	-
11	Penambahan KDP	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	-
14	<b>Jumlah Penambahan (5 s.d 13)</b>	<b>1.062.898.000,00</b>
	<b>PENGURANGAN</b>	-
15	Pengurangan KDP	-
16	Retensi 5%	-
17	Non Aset	-
18	Ekstra	9.000.000,00
19	Penghapusan	-
20	Pengembalian Dana	-
21	Mutasi Antar SKPD	-
22	Reklasifikasi KIB	-
23	<b>Jumlah Pengurangan (15 s.d 22)</b>	<b>9.000.000,00</b>
	<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (4+14-23)</b>	<b>2.560.747.000,00</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Koreksi kurang atas saldo aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 adalah Rp1.062.898.000,00
- B. Koreksi tambah atas saldo aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 adalah Rp9.000.000,00



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

- C. Adanya penambahan atas saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.062.898.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
1. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan belanja modal tahun 2020 sebesar Rp1.053.898.000,00 adalah sebagai berikut :
    - a. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp207.020.000,00 adalah Rehab Ruang Kerja.
    - b. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp219.750.000,00 adalah Belanja Gedung dan Bangunan (Aula Pertemuan Depan Dinkes).
    - c. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan adalah sebesar Rp149.943.000,00 adalah Pembangunan Gudang Terbuka Gudang Aset Pemko.
    - d. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp66.150.000,00 adalah Pemasangan Pagar Panel Gudang Aset Pemko.
    - e. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp155.150.000,00 adalah Rehab ruang bidang Anggaran.
    - f. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp199.020.000,00 adalah Rehab Gudang Arsip Eks Rumah Sakit.
    - g. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp9.000.000,00 adalah Bangunan Taman.
    - h. Penambahan saldo aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp56.865.000,00 adalah Rehab Gedung Kantor Milik Pemko (Bawaslu).

**5.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>49.350.000,00</b>	<b>49.350.000,00</b>

Aset tetap-jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Saldo aset tetap-jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp49.350.000,00 dan Rp49.350.000,00. Aset tetap jalan, irigasi



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

dan jaringan pada tahun 2020 tidak adanya penambahan maupun pengurangan dari total aset jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2019	49.350.000,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	<b>Saldo Awal 2019 (1-2+3)</b>	<b>49.350.000,00</b>
	<b>PENAMBAHAN</b>	-
5	Belanja Modal 2020	-
6	Retensi 5%	-
7	Belanja Pegawai 2019	-
8	Belanja Barang Jasa 2019	-
9	BOP/BOS/BOM	-
10	Hibah	-
11	Penambahan KDP	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	-
14	<b>Jumlah Penambahan (5 s.d 13)</b>	-
	<b>PENGURANGAN</b>	-
15	Pengurangan KDP	-
16	Retensi 5%	-
17	Non Aset	-
18	Ekstra	-
19	Penghapusan	-
20	Pengembalian Dana	-
21	Mutasi Antar SKPD	-
22	Reklasifikasi KIB	-
23	<b>Jumlah Pengurangan (15 s.d 22)</b>	-
	<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (4+14-23)</b>	<b>49.350.000,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

- A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 adalah Nihil;**
- B. Koreksi Tambah Atas Saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 adalah Nihil;**
- C. Penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp0,00**

Penambahan Aset Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2020 disebabkan karena adanya Belanja Modal sebesar Rp 0,00,- sebagai aset tetap-jalan, irigasi dan jaringan;
- D. Pengurangan terhadap Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp0,00**

Pada tahun 2020 terdapat aset tetap yang dieliminasi dari neraca disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

1. Mutasi antar SKPD sebesar Rp0,00, dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Pengelola
2. Ekstra sebesar Rp0,00 berdasarkan keseluruhan data diatas, total saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan di neraca per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.350.000,00 yang akan menjadi Saldo Awal Neraca Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2020.

**5.2.2.5. Aset Tetap Lainnya**

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3.225.000,00</b>	<b>3.225.000,00</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.225.000,00 dan Rp3.225.000,00 tidak adanya penambahan terhadap aset tetap lainnya untuk tahun 2020 dari total aset Tetap Lainnya tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA (Rp)</b>
1	Saldo Per 31 Desember 2019	3.225.000,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	<b>Saldo Awal 2020 (1-2+3)</b>	<b>3.225.000,00</b>
	<b>PENAMBAHAN</b>	
5	Belanja Modal 2020	-
6	Retensi 5%	-
7	Belanja Pegawai 2020	-
8	Belanja Barang Jasa 2020	-
9	BOP/BOS/BOM	-
10	Hibah	-
11	Penambahan KDP	-
12	Mutasi Antar SKPD	-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA (Rp)
13	Reklasifikasi KIB	-
14	<b>Jumlah Penambahan (5 s.d 13)</b>	-
	<b>PENGURANGAN</b>	
15	Pengurangan KDP	-
16	Retensi 5%	-
17	Non Aset	-
18	Ekstra	-
19	Penghapusan	-
20	Pengembalian Dana	-
21	Mutasi Antar SKPD	-
22	Reklasifikasi KIB	-
23	<b>Jumlah Pengurangan (15 s.d 22)</b>	-
	<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (4+14-23)</b>	<b>3.225.000,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, penambahan dan pengurangan aset tetap diatas dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

- A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2020 adalah Nihil;
- B. Koreksi Tambah Atas Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2020 adalah Nihil;
- C. Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2020 adalah Nihil;
- D. Pengurangan terhadap Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2020 adalah Nihil;

Berdasarkan keseluruhan data diatas, total saldo aset tetap lainnya di neraca per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.225.000,00 yang akan menjadi Saldo Awal Neraca Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2020.

#### 5.2.2.6 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<u>(4.624.474.347,82)</u>	<u>(4.122.014.305,22)</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing (Rp4.624.474.347,82) dan (Rp 4.122.014.305,22). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya. Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	UNIT KERJA	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.681.723.406,56
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	269.642.441,26
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.337.500,00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	UNIT KERJA	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	165.498.000,00
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	495.273.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.624.474.347,82</b>

#### 5.2.2.7 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<u>223.760.000,00</u>	<u>205.760.000,00</u>

Merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2020 mengalami Kenaikan sebesar Rp223.760.000,00 atau sebesar 01.79% dari Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019.

NO	URAIAN	KDP (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2019	205.760.000,00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	<b>Saldo Awal 2020 (1-2+3)</b>	<b>205.760.000,00</b>
<b>PENAMBAHAN</b>		
5	Belanja Modal 2020	18.000.000,00
6	Retensi 5%	-
7	Belanja Pegawai 2020	-
8	Belanja Barang Jasa 2020	-
9	BOP/BOS/BOM	-
10	Hibah	-
11	Penambahan KDP	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	-
14	<b>Jumlah Penambahan (5 s.d 13)</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
15	Pengurangan KDP	-
16	Retensi 5%	-
17	Non Aset	-
18	Ekstra	-
19	Penghapusan	-
20	Pengembalian Dana	-
21	Mutasi Antar SKPD	-
22	Reklasifikasi KIB	-
23	<b>Jumlah Pengurangan (15 s.d 22)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (4+14-23)</b>	<b>223.760.000,00</b>

- A. Koreksi kurang atas saldo aset tak berwujud tahun 2020 adalah Nihil
- B. Koreksi tambah atas saldo aset tak berwujud tahun 2020 adalah Rp18.000.000,00
- C. Penambahan nilai aset tak berwujud Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

**Banjarmasin pada tahun 2020 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**

1. Adanya penambahan nilai aset tak berwujud sebesar Rp18.000.000,00 terdiri dari:
  - a. Penambahan saldo aset tak berwujud berdasarkan belanja modal tahun 2020 sebesar Rp18.000.000,00 adalah Pembuatan Aplikasi “ Sipaber dan Anti Virus”

**D. Pengurangan aset tak berwujud tahun 2020 adalah Nihil**

**5.2.2.8 Amortisasi Aset Tak Berwujud**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(Rp.18.000.000,00)</b>	<b>(Rp.14.500.000,00)</b>

Saldo amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp18.000.000,00 dan Rp14.500.000,00. Amortisasi aset tak berwujud merupakan kontra akun aset tak berwujud yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tak berwujud.

**5.2.2.9 Aset Lain-lain**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>536.289.000,00</b>	<b>421.131.000,00</b>

Merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp536.289.000,00 merupakan aset tetap yang diusulkan untuk dihapus karena rusak berat dan dihentikan dari penggunaan termasuk didalamnya adalah saldo aset lain-lain akibat adanya peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KDP (Rp)</b>
1	Saldo Per 31 Desember 2019	421.131.000,00
2	Koreksi Kurang	0,00
3	Koreksi Tambah	0,00
4	<b>Saldo Awal 2020 (1-2+3)</b>	<b>421.131.000,00</b>
	<b>PENAMBAHAN</b>	
5	Belanja Modal 2020	-
6	Retensi 5%	-
7	Belanja Pegawai 2020	-
8	Belanja Barang Jasa 2020	-
9	BOP/BOS/BOM	-
10	Hibah	-
11	Penambahan KDP	-
12	Mutasi Antar SKPD	-
13	Reklasifikasi KIB	116.858.000,00
14	<b>Jumlah Penambahan (5 s.d 13)</b>	<b>116.858.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

NO	URAIAN	KDP (Rp)
	<b>PENGURANGAN</b>	
15	Pengurangan KDP	-
16	Retensi 5%	-
17	Non Aset	-
18	Ekstra	-
19	Penghapusan	1.700.000,00
20	Pengembalian Dana	-
21	Mutasi Antar SKPD	-
22	Reklasifikasi KIB	-
23	<b>Jumlah Pengurangan (15 s.d 22)</b>	<b>1.700.000,00</b>
	<b>Saldo Per 31 Desember 2019 (4+14-23)</b>	<b>536.289.000,00</b>

**A. Koreksi kurang atas saldo Aset lain-lain tahun 2020 adalah Rp0,00**

**B. Koreksi tambah atas saldo Aset lain-lain tahun 2020 adalah Rp0,00**

**C. Penambahan Aset Lain-Lain Tahun 2020 sebesar Rp116.858.000,00**

1. Mutasi Antar SKPD sebesar Rp116.858.000,00 dikarenakan adanya perubahan kondisi aset dari baik menjadi rusak berat yang akan diusulkan untuk dihapus dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN	NILAI (Rp)	REKLASIFIKASI
1.	Brandkas	6.568.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
2.	Lemari Kaca	1.300.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
3.	Lemari Kaca	1.300.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
4.	Dst....	10.000.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
5.	Televisi	3.500.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
6.	Televisi	3.000.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
7.	Sound System	4.000.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
8.	Tustel	4.800.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
9.	P.C Unit	8.100.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
10.	P.C Unit	8.100.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
11.	P.C Unit	8.590.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
12.	Lap Top	12.475.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
13.	Lap Top	12.475.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
14.	Dst....	2.750.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
15.	Unit Pemancar UHF Stationary	4.950.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
16.	Unit Pemancar UHF Stationary	4.950.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
17.	Lap Top	20.000.000,00	DARI KIB PERALATAN DAN MESIN
	<b>JUMLAH</b>	<b>116.858.000,00</b>	

**D. Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun 2020 adalah Rp1.700.000,00**

Pengurangan Aset Lain-lain Tahun 2020 adalah Unit Power Supply sebanyak 1 buah.

**5.2.2.10 Akumulasi Penyusutan  
Aset Lain-lain**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	<b>Rp 41.016.000,00</b>	<b>Rp 37.256.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp41.016.000,00 dan Rp37.256.000,00. Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan kontra akun aset lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lain-lain.

### 5.2.3 Kewajiban

**31 Desember 2020**  
(Rp)  
**26.405.450.282,00**

**31 Desember 2019**  
(Rp)  
**19.719.169.770,00**

No	Uraian	31-Des-2020	31-Des-2019
1	Kewajiban yang dikonsolidasikan	26.405.450.282,00	19.719.169.770,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.405.450.282,00</b>	<b>19.719.169.770,00</b>

(Rupiah)

#### 5.2.3.1 Kewajiban Untuk dikonsolidasikan

**31 Desember 2020**  
(Rp)  
**26.405.450.282,00**

**31 Desember 2019**  
(Rp)  
**19.719.169.770,00**

## 5.3 LAPORAN OPERASIONAL

### 5.3.1 Beban Operasi

**31 Desember 2020**  
(Rp)  
**22.539.473.987,46**

**31 Desember 2019**  
(Rp)  
**18.582.076.131,64**

#### Rincian Beban Operasi

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Pegawai-LO	15.703.222.565,00	10.132.746.722,00	5.570.475.843,00	21,30
2	Beban Barang dan Jasa	5.986.197.921,00	7.683.804.687,00	(1.697.606.766,00)	(22,09)
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	850.053.501,46	765.524.722,64	84.528.778,82	11,04
	<b>TOTAL</b>	<b>22.539.473.798,46</b>	<b>18.582.076.131,64</b>	<b>3.957.397.855,82</b>	<b>18,21%</b>

#### 5.3.1.1 Beban Pegawai – LO

**31 Desember 2020**  
(Rp)  
**15.703.222.565,00**

**31 Desember 2019**  
(Rp)  
**10.132.746.722,00**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Beban Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.15.703.222.565,00. Nilai tersebut terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan.

**5.3.1.2 Beban Barang dan Jasa**

<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>5.986.197.921,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>7.683.804.687,00</b>
---	---

Beban Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.5.986.197.921,00.

**5.3.1.3 Beban Penyusutan Dan Amortisasi**

<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>850.053.501,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>765.524.722,64</b>
---	---

**5.3.2 Surplus/Defisit Non Operasional**

<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>0,00</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>0,00</b>
---	---

**5.3.3 Surplus/Defisit-LO**

<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>(22.539.473.987,46)</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>(18.582.076.131,64)</b>
--	--

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional	(22.539.473.987,46)	(18.582.076.131,64)	21,30%
2	Beban Transfer	0,00	0,00	
3	Defisit Non Operasional	0,00	0,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>(22.539.473.957,46)</b>	<b>(18.582.076.131,64)</b>	<b>21,30%</b>

**5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**5.4.1 Ekuitas Awal**

<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>3.007.855.439,50</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>2.800.552.882,91</b>
---	---



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(22.539.473.987,46)	(18.582.076.131,64)

5.4.3 Koreksi-Koreksi

5.4.3.1 Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2.375.333,00	0,00

5.4.3.2 Mutasi Masuk Aset Tetap Antar SKPD

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4.519.285,71,00	4.519.285,71,00

5.4.3.3 Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(903.857,14)	(903.857,14)

5.4.3.4 Mutasi Keluar Aset Tetap Antar SKPD

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(4.341.433.137,92)	(992.646.120,00)

5.4.3.5 Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
435.893.458,86	90.000.000,00

5.4.3.6 Reklasifikasi Aset Intra Menjadi Aset Ekstrakompatabel

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(51.326.368,43)	(30.760.390,34)



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

**5.4.4 Kewajiban**

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>26.405.450.282,00</b>	<b>19.719.169.770,00</b>

**5.4.5 Ekuitas Akhir**

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2.922.956.448,45</b>	<b>3.007.855.439,50</b>



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

Dalam menyajikan Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual. Basis Akrual adalah “Penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya” bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (cash basis). Akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang. Adapun Landasan Hukum Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Output yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014. Neraca merupakan sub system keuangan yang terpisah dari SIKD. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No. 3 Tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Catatan Atas Laporan keuangan (CALK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru tahun 2020 ini disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan.

Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang lebih baik.

**Banjarbaru, Desember 2020**  
**Pengguna Anggaran,**

**H. Jainudin, S.Sos, M. AP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19650910 198602 1 008**